BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 05 Mei 2008
Halaman : 17

Primadona Menggiurkan, tapi Mengancam Lingkungan

LUAS DAN RENCANA EKSPANSI LAHAN SAWIT DI INDONESIA

NO	PROVINSI	2006		2007	
		Lahan yang Sudah ada	Perluasan	Lahan yang sudah Ada	Perluasan
1	Bali				
2	Bangka Belitung	112762		138367	
3	Banten	17375		17375	
4	Bengkulu	90000	500,000	162440	500,000
5	Daerah Istimewa Yogyakarta				
6	DKI Jakarta				
7	Gorontalo			42032	
8	Jambi	694310	1,000,000	694310	1,000,000
9	Jawa Barat	3747		10666	
10	Jawa Tengah				
11	Jawa Timur				
12	Kalimantan Barat	411261	5,000,000	434459	5,027,300
13	Kalimantan Selatan	391671	500,000	391671	500,000
14	Kalimantan Tengah	583000	1,000,000	737556	1,467,100
15	Kalimantan Timur	303040	1,000,000	303040	1,202,000
16	Kepulauan Riau			14936	
17	Lampung	148000	500,000	164786	500,000
18	Maluku			61590	
19	Maluku Utara				
20	Nanggroe Aceh Darussalam	222389	340,000	283283	635,000
21	Nusa Tenggara Barat				
22	Nusa Tenggara Timur				
23	Papua	97000	3,000,000	97000	4,000,000
24	Riau	1567000	3,000,000	1600000	3,012,300
25	Sulawesi Selatan	72133	500,000	72133	500,000
26	Sulawesi Tengah	81307	500,000	81307	500,000
27	Sulawesi Tenggara	3602	500,000	3602	700,000
28	Sulawesi Utara				
29	Sumatera Barat	284000	500,000	310281	500,000
30	Sumatera Selatan	551000	1,000,000	618000	1,000,000
31	Sumatera Utara	800000	1,000,000	1044230	1,079,900
Luas Total		6,433,597	19,840,000	7,283,064	22,123,600

Sumber : Sawit Watch 2008 ANTONI

Sejak lima tahun terakhir ini pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Banyak pengusaha lokal, swasta nasional dan internasional, datang ke daerah ini mencari lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Ilham Sanusi salah seorang ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) cabang Kalbar kepada *SP* mengatakan, sawit merupakan primadona bagi pertumbuhan ekonomi Kalbar. Sebab, perkebunan sawit adalah salah satunya pengganti usaha bidang perkayuan yang sudah gulung tikar.

Luas lahan yang sudah ditanami sawit berkisar 400.000 hektare lebih. Dari jumlah itu sekitar 200.000 hektare lebih sudah panen atau berproduksi dan selebihnya dalam satu hingga dua tahun ke depan akan mulai berproduksi, sehingga ke depan, Kalbar bisa mendapatkan devisa dari ekspor minyak sawit kasar (*crude palm oil*/CPO) kurang lebih Rp 4 triliun/tahun.

Sawit juga dinilai sebagai primadona di Jambi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ir H Ali Lubis mengatakan, provinsi ini telah ditetapkan sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Karena itu, pemerintah setempat terus memacu pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program pembangunan sejuta hektare kebun kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di daerah itu saat ini mencapai 442.888 hektare (ha).

Tidak hanya di Jambi, perkebunan sawit di Sumatera Selatan, juga sudah begitu luas. Sampai sekarang dari puluhan perkebunan sawit lahan yang dicadangkan, sudah mencapai 345.178 hektare. Jumlah ini dinilai demikian luas, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dengan tidak lagi memberikan izin untuk mengalokasikan lahan untuk sawit.

Akibat pembukaan lahan sawit yang maha luas, hutan di Provinsi Jambi semakin di ambang kehancuran saat ini. Program pembangunan sejuta hektare kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi membuat semakin banyak kawasan hutan beralih fungsi menjadi hutan sawit.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menyempitnya luas hutan di Jambi tersebut semakin menebar ancaman kerusakan lingkungan. Kehancuran hutan mengakibatkan punahnya komunitas adat terpencil (suku terasing serta satwa langka dan fauna dilindungi.

Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi) Jambi, Ir Rachmat Hidayat mengatakan, pembangunan perkebunan sawit skala besar dan penebangan hutan untuk industri kayu yang tidak terkendali mengakibatkan kehidupan komunitas adat terpencil Suku Kubu di daerah itu semakin terancam.

Tergusur

"Penggundulan hutan untuk industri kayu dan perkebunan membuat Orang Rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi semakin terancam. Sebagian anggota kelompok komunitas adat terpencil itu sudah tergusur dari hutan dan telantar. Hal itu tidak terhindari karena hutan yang menjadi tempat hidup mereka habis, sementara mereka tidak memiliki usaha pertanian," katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sumsel, Lestari Kadariah di Palembang Jumat (2/5) mengingatkan, tanaman monokultur sangat rakus dengan air, dan menghilangkan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada.

Disebutkan, tanaman monokultur akan bisa mempengaruhi sistem serapan tanah dan dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, dia berharap tak ada lagi izin untuk lahan lawit di Sumsel.

Penolakan serupa juga disampaikan Ketua Walhi Kalbar, Saban. Dia meminta kepada Pemprov Kalbar untuk menghentikan pengembangan dan pemberian izin perkebunan sawit.

Sementara itu, Janting ketua Konsosrsim anti Ilegal Loging (KAIL) mengatakan, pembukaan perkebunan sawit sudah tentu menimbulkan konflik di masyarakat dan menimbulkan kerusakan hutan. Kenyataannya, pembukaan lahan sawit dilakukan dengan cara membersihkan hutan dengan menebang semua pohon yang tumbuh dan melakukan pembakaran, sehingga tidak ada tumbuhan yang tersisa.

Gubernur Kalbar, Cornelis MH beberapa waktu lalu telah meminta para bupati se-Kalbar melakukan evaluasi terhadap izin perkebunan sawit yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya bupati diminta untuk menghentikan pengeluaran izin baru untuk pekerbunan sawit.

Direktur Walhi Riau, Johny Mundung menyebutkan, pembabatan hutan besar-besaran untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit di Riau membawa dampak kerusakan lingkungan. Terjadinya erosi dan banjir di saat musim hujan merupakan kejadian yang terus berlangsung tiap tahun.

Ketua FKPMR Abbas Djamil sangat menyayangkan izin yang dikeluarkan lembaga kehutanan, nyaris tanpa pengawasan ketat. Rekomendasi dari kabupaten dan provinsi umum disetujui pusat. Jika timbul masalah daerah yang selalu disalahkan, sedangkan pusat lepas tanggung jawab, hingga yang korban rakyat kecil," tuturnya. [MUL/148/141/133]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup